

SOROTI PEMBELIAN MINYAKITA, OMBUDSMAN BABEL MINTA DISTRIBUTOR DIDATA

Jum'at, 10 Februari 2023 - Agung Nugraha

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Ombudsman RI Bangka Belitung (Babel) meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) agar ikut memastikan penyaluran MinyakKita agar sesuai dengan tujuan.

Termasuk juga mendata distributor Minyakita guna mengetahui kepastian jumlah stok MinyakKita di lapangan.

"Untuk memastikan stok dan penyaluran MinyakKita, peran dinas perdagangan terkait pada tingkat provinsi/kota/daerah untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya. Jangan sampai adanya potensi belum disalurkan MinyakKita ke pasar tradisional dari Distributor," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Shulby Yozar Ariadhy, Rabu (8/2/2023).

Ia juga menekankan agar informasi seperti persyaratan dan mekanisme pembelian MinyakKita dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

"Kami harap informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, mekanisme dan prosedur, dan lokasi pembelian MinyakKita dapat diinformasikan secara meluas oleh pemangku kepentingan terkait apabila aturan ini diberlakukan," ujar Yozar.

Yozar menambahkan disperindag mesti segera mendata distributor MinyakKita agar mengetahui secara pasti jumlah stok yang ada di lapangan.

"Tentu Ombudsman Babel berharap proses pendataan distributor dapat diselesaikan, dimana kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng rakyat sangat tinggi. Selain itu, pemerataan penyaluran MinyakKita mesti dapat dilakukan secara komprehensif sesuai dengan permintaan masyarakat," katanya.

Mekanisme pembelian dan stok MinyakKita menjadi pembahasan akhir-akhir ini.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat membeli MinyakKita.

Di Bangka Belitung, pembelian MinyakKita belum mensyaratkan pakai KTP.

Hal ini ditegaskan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangka Belitung.

Tak hanya mekanisme pembelianya, stok MinyakKita juga menjadi sorotan saat ini karena sulit ditemukan di pasar kota Pangkalpinang.

Yozer berharap informasi soal pembelian MinyakKita penting untuk disampaikan ke publik, agar tak membingungkan.

Selain itu, pemerintah harus memberikan kebijakan yang memudahkan masyarakat.

"Kebijakan pemerintah terkait prosedur pembelian MinyakKita menggunakan KTP atau aplikasi PeduliLingkungan sebagai persyaratan kurang memberikan kemudahan akses masyarakat membeli minyak goreng. Kami harap informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, mekanisme dan prosedur, dan lokasi pembelian MinyakKita dapat diinformasikan secara meluas oleh pemangku kepentingan terkait apabila aturan ini diberlakukan," ujar Yozer.

Pembelian MinyakKita Dibatasi

Pembelian minyak goreng kemasan MinyakKita di Bangka Belitung belum menggunakan kartu Tanda penduduk (KTP) sebagai syaratnya.

Dengan demikian, pembeli tak perlu menunjukkan KTP. Namun pembelian minyak goreng ini dibatasi jumlahnya.

"Jadi banyak yang bertanya kepada kita, apakah beli MinyakKita pakai KTP, kami sudah coba tanyakan, tidak menggunakan KTP hanya saja dibatasi, satu orang itu paling banyak 10 liter," ujar Kabid Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Babel, Fadri Djagahitam, Rabu (8/2/2023).

Dia berharap masyarakat tak perlu resah soal pemberitaan yang menyebutkan membeli MinyakKita dengan KTP.

"Masyarakat diharap tenang, dan MinyakKita ini memang banyak peminat terutama biasa bagi pelaku usaha karena harga lebih murah," katanya.

Sebelumnya diberitakan, MinyakKita sulit untuk ditemukan di pasaran kota Pangkalpinang, hal ini karena stok yang sedikit.

"MinyakKita itu katanya sedikit, sebenarnya jumlah DMO banyak tapi permintaan dari masyarakat meningkat maka habis di pasaran," katanya.

Mulai Februari hingga April dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat menghadapi bulan puasa dan lebaran, akan ditambah stoknya sebanyak 450 ribu ton.

"InsyaAllah minggu depan sudah datang (stok MinyakKita-red), dari penambahan yang 450 ribu ton itu, kalau untuk Bangka Belitung belum tahu, soalnya distributor belum terdata semuanya. Sudah banyak lagi nanti stoknya untuk menghadapi puasa dan lebaran ini serta berkelanjutan," katanya.

Minyakita dibebaskan bukan minyak subsidi, melainkan minyak yang didistribusi dengan skema Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (PMO) yang diberlakukan oleh eksportir dan produsen minyak goreng.

Dalam penyaluran minyak goreng rakyat ini dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp14.000/liter atau Rp15.500/kg di tingkat konsumen. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)